

Transformasi Kepemudaan melalui Kemitraan: Studi Kasus KNPI dan Pemerintah Kota Makassar

Youth Transformation through Partnership: Case Study of KNPI and Makassar City Government

Irwan Ade Saputra^{1*}

¹ Departemen Politik Pemerintahan
Universitas Hasanuddin, Makassar

email: irwan_adhe@unhas.ac.id

Kata Kunci

Kemitraan
Organisasi Masyarakat
Tata kelola

Keywords:

Partnership
Community organization
Governance

Received: March 2024

Accepted: March 2024

Published: March 2024

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pola kemitraan antara KNPI dan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan kepemudaan dengan fokus pada kesetaraan, akuntabilitas, dan manfaat. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, analisis dokumen resmi, dan laporan kegiatan. Hasilnya menunjukkan bahwa kemitraan ini berhasil mengembangkan kesetaraan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program, dengan KNPI berperan sebagai database, pelaksana program, dan pengontrol kebijakan, sementara pemerintah menyediakan dukungan hukum, anggaran, dan sarana prasarana. Kemitraan ini memberikan kontribusi positif dalam pembangunan kepemudaan Kota Makassar melalui hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Abstract

This research analyzes the partnership pattern between KNPI and the Makassar City Government in youth development with a focus on equality, accountability and benefits. A qualitative approach using the case study method was used by collecting data through in-depth interviews, analysis of official documents and activity reports. The results show that this partnership has succeeded in developing equality in policy formulation and program implementation, with KNPI acting as a database, program implementer and policy controller, while the government provides legal support, budget and infrastructure. This partnership makes a positive contribution to the youth development of Makassar City through a mutually beneficial reciprocal relationship.



© Year Author(s). Published by Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur <https://jurnal.uit.ac.id/JIPE>. This is Open Access article under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) DOI: <https://doi.org/10.36090>

PENDAHULUAN

Pembangunan kepemudaan adalah salah satu aspek krusial dalam keberlanjutan dan kemajuan suatu bangsa. Indonesia, dengan jumlah penduduk muda yang signifikan, memiliki potensi besar dalam bidang ini. Kepemudaan bukan hanya sekedar kelompok usia, tetapi juga representasi masa depan bangsa yang perlu dikembangkan dengan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan (Walther et al., 2021). Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya peran pemuda dalam pembangunan dan mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung pengembangan potensi pemuda, salah satunya adalah Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009. (Bimantoro, 2021)

Kemitraan antara pemerintah dan organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan ini. Kemitraan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana kemitraan ini diimplementasikan di tingkat daerah, seperti di Kota Makassar, dan bagaimana prinsip-prinsip seperti kesetaraan, akuntabilitas, dan manfaat diterapkan dalam kerangka kerja sama tersebut. (Nursamsami et al., 2020; Querol et al., 2021)

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pola kemitraan antara KNPI dan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan kepemudaan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip governance, seperti kesetaraan dan akuntabilitas, diterapkan dalam kemitraan ini. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dari kemitraan ini, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemitraan yang baik antara pemerintah dan organisasi kepemudaan dapat meningkatkan efektivitas program-program kepemudaan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh berbagai peneliti menunjukkan bahwa pelibatan organisasi kepemudaan dalam perumusan kebijakan dapat memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pemuda. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasi kemitraan ini, terutama terkait dengan masalah akuntabilitas dan kesetaraan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola kemitraan antara KNPI dan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan kepemudaan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan dalam kemitraan ini? Bagaimana akuntabilitas kedua belah pihak terjaga? Apa saja manfaat yang diperoleh dari kemitraan ini? Dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan ini?

Melalui analisis mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kemitraan antara KNPI dan Pemerintah Kota Makassar. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan kemitraan yang efektif dengan organisasi kepemudaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi KNPI dan Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan efektivitas kemitraan mereka.

Pentingnya mengembangkan potensi pemuda tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan politik (Hipolito-Delgado et al., 2021). Pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang dapat mendorong pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, kemitraan yang baik

antara pemerintah dan organisasi kepemudaan seperti KNPI sangat penting untuk memastikan bahwa potensi pemuda dapat dikembangkan secara optimal.

Di Kota Makassar, KNPI telah menunjukkan peran yang signifikan dalam pembangunan kepemudaan. Melalui berbagai program dan kegiatan, KNPI telah berhasil melibatkan banyak pemuda dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan konstruktif. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal akuntabilitas dan pelibatan pemuda secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana tantangan-tantangan ini dapat diatasi. (Aslinda et al., 2022)

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk memahami pola kemitraan antara KNPI dan Pemerintah Kota Makassar, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan kepemudaan di Indonesia..

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pola kemitraan antara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan kepemudaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti perwakilan KNPI, pejabat pemerintah, dan pemuda yang terlibat dalam program-program kepemudaan. Selain itu, dokumen-dokumen resmi, laporan kegiatan, dan peraturan terkait juga dianalisis untuk memahami implementasi prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan manfaat dalam kemitraan ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan manfaat dari kemitraan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola kemitraan dalam pembangunan kepemudaan diatur dalam Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009, yang mendefinisikan kemitraan sebagai kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Pasal 32 mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat. Pasal 33 juga menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemitraan sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dengan dunia usaha.

Kesetaraan

Dalam prinsip Governance, kesetaraan merujuk pada kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan, di mana semua warga masyarakat memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip ini menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat, memanfaatkan berbagai jalur komunikasi seperti brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio, serta televisi lokal, dan menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

Kesetaraan antara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan kepemudaan diwujudkan melalui perumusan kebijakan bersama tentang peraturan daerah atau program-program yang berhubungan dengan kepemudaan. Hasil wawancara dengan dinas sosial, pemuda, dan olahraga mengungkapkan bahwa organisasi kepemudaan selalu dilibatkan dalam perumusan dan implementasi program sebagai mitra aktif pemerintah. Pengurus KNPI juga mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam setiap kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan.

Berdasarkan analisis, kesetaraan yang dikembangkan di sini adalah kesetaraan proses, bukan kesetaraan politik. Keputusan tentang penetapan kebijakan tetap merupakan urusan pemerintahan, namun masukan dari KNPI sangat penting agar kebijakan kepemudaan tepat sasaran. Pengakuan pemerintah terhadap kapasitas dan kapabilitas KNPI juga terlihat dalam berbagai agenda pelatihan dan pendidikan, di mana perwakilan KNPI sering menjadi pemateri, narasumber, dan fasilitator.

Program kemitraan antara Pemerintah Kota Makassar dan KNPI selama dua tahun terakhir mencakup 35 aksi kemitraan, termasuk seminar dan perumusan kebijakan. Program-program ini meliputi diseminasi kemanusiaan dan kepemudaan, expo pemuda mandiri, pelatihan iptek, kewirausahaan, pengembangan karakter, dan potensi minat dan bakat pemuda, serta berbagai kegiatan lainnya. Kesetaraan diwujudkan dalam hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, di mana tanpa masukan dari KNPI, kebijakan kepemudaan tidak akan tepat sasaran.

.Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) berarti keadaan di mana seseorang atau kelompok harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat diminta pertanggungjawaban. Prinsip ini mencakup kewajiban individu atau penguasa yang mengelola sumber daya publik untuk melaporkan dan menjawab tentang penggunaan sumber daya tersebut serta pencapaian hasilnya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam reformasi sektor publik, yang mendorong para pelaku untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik.

Menurut Lawton dan Rose, akuntabilitas adalah proses di mana individu atau kelompok harus membuat laporan aktivitas mereka, menunjukkan bagaimana mereka melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan. Sebagai salah satu prinsip good corporate governance, akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, serta menuntut kemampuan untuk menjawab dan konsekuensi dari tindakan mereka. Aspek penting dari akuntabilitas adalah hak publik untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pihak yang diberi kepercayaan, yang mencakup kemudahan akses informasi baik secara lisan maupun tulisan.

Dalam konteks kepemudaan di Kota Makassar, terdapat dua arah akuntabilitas: akuntabilitas pemerintah kepada pemuda dan akuntabilitas Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kepada pemerintah. Akuntabilitas pemerintah kepada pemuda diwujudkan melalui forum stakeholder kepemudaan, di mana KNPI diundang untuk memberikan laporan kemajuan kerja dinas terkait dan menampung aspirasi sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Forum ini memperlihatkan pertanggungjawaban organisasi kepada publik kepemudaan melalui pertemuan rutin yang membahas perkembangan kegiatan.

Akuntabilitas KNPI kepada Pemerintah Kota Makassar diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kepemudaan, termasuk pemberian gedung KNPI di Jalan AP Pettarani. KNPI melaporkan kondisi bangunan dan sarana prasarana melalui laporan pertanggungjawaban tahunan, yang mencakup utilitas dan kebutuhan perbaikan bangunan.

Pertanggungjawaban terhadap dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada KNPI juga menunjukkan akuntabilitas organisasi ini. Penggunaan dana hibah dilaporkan secara transparan dalam bentuk tabel dan laporan yang mencakup program-program yang didukung oleh dana tersebut. Ini memperlihatkan adanya sistem kontrol yang efektif dan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik, yang merupakan esensi dari akuntabilitas. (Grossman & Slough, 2022)

Tabel 1. Dana Hibah Pemerintah Kota Makassar Kepada KNPI Kota Makassar

No	Program kerja	Dana Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Dana Hibah	total
1	Menghadiri kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Papua	800.000	20.000.000	20.800.000
2	Musyawarah kecamatan DPK se-kota Makassar	1.596.250	102.000.000	103.596.250
3	Pelantikan dan orientasi DPK	3.597.500	259.000.000	262.597.500
4	Raker XIII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Makassar	5.456.000	296.000.000	301.456.000
5	Aksi sosial pengobatan gratis	850.000	16.000.000	16.850
6	Sosislisasi UU 40/2009 bagi pelajar	1.007.000	72.000.000	73.007.000

No	Program kerja	Dana Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Dana Hibah	total
7	Sosialisasi pengenalan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) bagi pelajar	422.000	46.000.000	46.422.000
Semiotika Kepemudaan				
8	Gerakan pemuda dalam mengisi kemerdekaan	1.276.000	72.000.000	73.276.000
9	Pengembangan kewirausahaan pemuda	675.000	15.000.000	15.675.000
Total		15.684.000	900.000.000	915.684.000

Sumber: Hasil Penelitian setelah diolah 2022

Asas Manfaat

Asas terakhir dalam kemitraan adalah asas manfaat. Secara definitif, asas manfaat dapat diukur dari seberapa besar kegunaan yang diperoleh antara dua atau lebih organisasi atau individu yang bermitra. Hasil penelitian tentang asas manfaat dalam kemitraan antara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Makassar dan Pemerintah Kota Makassar menunjukkan berbagai manfaat yang signifikan.



Gambar 1. Siklus Asas Manfaat Antara KNPI dan Pemkot Mkassar

Asas manfaat dalam kemitraan antara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Makassar dan Pemerintah Kota Makassar terlihat jelas dari beberapa aspek. Pertama, KNPI menyediakan database kepemudaan yang komprehensif karena merupakan wadah berkumpulnya organisasi kepemudaan seluruh kota, memungkinkan pemetaan stakeholder secara menyeluruh dan mendukung kebijakan yang memenuhi kepentingan banyak pihak. Kedua, KNPI berperan sebagai pelaksana program, memastikan bahwa program kepemudaan yang diinisiasi dan dijalankan oleh pemuda untuk pemuda dapat terlaksana dengan baik. Ketiga, KNPI berfungsi sebagai pendamping, membantu pemerintah menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, terutama di tingkat kecamatan. Keempat, KNPI juga berfungsi sebagai pengontrol, memastikan kebijakan pemerintah daerah terealisasi dalam koridor ideal. Selain itu, dengan menyediakan database kepemudaan,

KNPI memiliki pengaruh signifikan dalam formulasi kebijakan, memahami kebutuhan banyak organisasi kepemudaan. (Praja et al., 2021)

Di sisi lain, peran pemerintah kota Makassar terhadap KNPI juga signifikan. Pertama, pemerintah memberikan payung hukum melalui regulasi, memastikan kegiatan KNPI berjalan sesuai dengan peraturan. Kedua, pemerintah menyediakan anggaran, yang sangat penting bagi keberhasilan kegiatan KNPI, sesuai dengan mandat undang-undang. Ketiga, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana seperti sekretariat, yang merupakan pusat operasional organisasi. Keempat, sinergi program antara pemerintah dan KNPI memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan atau peraturan, dan sumber daya yang lebih besar dari pemerintah kota dapat mendukung kegiatan KNPI secara efektif.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang berdiri sejak 23 Juli 1973, telah menjadi wadah berhimpun terbesar dan paling majemuk bagi kaum muda Indonesia. Dengan berbagai latar belakang keagamaan dan politik, mengelola dinamika internal KNPI sambil merespons tantangan eksternal bukanlah hal yang mudah. Berdasarkan Kongres XIV KNPI di Papua, setidaknya ada 154 organisasi kemasyarakatan pemuda yang tergabung dalam KNPI, yang terbagi menjadi empat cluster: organisasi berbasis keagamaan, sayap partai politik, organisasi mahasiswa, serta organisasi profesi dan komunitas.

Keragaman ini menjadikan KNPI rentan terhadap pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok. Meski begitu, komitmen bersama di antara organisasi pendiri dan kelompok Cipayung membantu mengelola friksi dan ketegangan yang muncul. KNPI terus berupaya menjaga kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas organisasi melalui verifikasi entitas organisasi yang bergabung. Selain itu, KNPI juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan mentalitas kader-kader muda yang tergabung di dalamnya.

Generasi muda memegang peran penting dalam pembangunan daerah, berfungsi sebagai pilar, penggerak, dan pengawal jalannya pembangunan. Namun, banyak generasi muda yang mengalami disorientasi dan terlibat dalam kepentingan politik praktis (Purna & Didin, 2022). Pemuda harus menjadi inisiator perubahan dan mengambil peran sentral dalam pembangunan daerah, dengan semangat nasionalisme yang kuat dan komitmen untuk memajukan daerah mereka. Peran pemuda dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi melalui entrepreneurship, tetapi juga mencakup peran sosial. Banyak organisasi kepemudaan yang menciptakan kegiatan berdampak positif bagi masyarakat, seperti bakti sosial dan pelatihan. Prinsip entrepreneurship ini penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia di kancah internasional. (Sukmawati & Rafni, 2020)

Selain meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan, pemuda juga harus membentuk kepribadian yang kuat untuk mempengaruhi keputusan dan semangat juang dalam pembangunan bangsa. Sebagai agen perubahan, pembangunan, dan modernisasi, pemuda memiliki tugas penting dalam menciptakan perubahan positif, mendorong pembangunan di segala bidang, dan menjadi pelopor pembaharuan. Dengan semangat dan tekad yang kuat, pemuda Indonesia dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan bangsa. Melalui peran mereka sebagai agen perubahan, pembangunan, dan modernisasi, pemuda memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan dan keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia di masa depan.

Revitalisasi

Kemitraan menjadi solusi tepat untuk mempercepat pembangunan karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan bersama. Misalnya, dalam program menabung pohon, masyarakat sekitar dan pemerintah bekerja sama demi pemeliharaan lingkungan. Dalam kemitraan, setiap pihak mendapatkan keuntungan sesuai peran masing-masing dengan prinsip persamaan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Fasilitator dalam program ini berperan penting dalam menjalin kemitraan yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. (Querol et al., 2021)

Membangun jejaring kerja atau kemitraan adalah proses berbagi ide, informasi, dan sumber daya atas dasar saling percaya dan menguntungkan. Ini dapat dilakukan jika pihak-pihak yang bermitra memiliki kesamaan visi, komitmen bersama, dan kepercayaan. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) perlu memaksimalkan peran ini agar mampu berfungsi sebagai penggerak pembangunan yang efektif dan strategis, sekaligus menjawab kritik dan keraguan yang muncul dari berbagai pihak.

KNPI seringkali terkesan menjalankan program secara rutin tanpa terobosan baru. Untuk mendorong kembali eksistensi dan peranannya, KNPI perlu revitalisasi organisasi dan reorientasi peran serta kegiatan sesuai dengan dinamika generasi muda dan perubahan masyarakat. Hal ini termasuk penguatan kelembagaan, peningkatan kemandirian pendanaan, serta menjadi pusat informasi dan wadah tukar ide bagi pemuda. (Vallentin, 2022)

Aksi strategis yang bisa dilakukan KNPI antara lain membangun kepengurusan yang plural, menguatkan internalisasi organisasi, menerapkan politik aspiratif, serta menjaga independensi dalam persaingan politik. KNPI juga perlu memosisikan diri sebagai mitra pemerintah, mengembangkan ide-ide solutif, dan menjaga sikap kritis serta kontrol terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang. (Maiboroda et al., 2021)

Selain itu, KNPI harus meningkatkan kemandirian pendanaan untuk menghindari kooptasi kepentingan tertentu. Menjadi pusat informasi kepemudaan dan wadah tukar ide serta gagasan adalah langkah penting

yang harus segera direalisasikan. Peran KNPI sebagai mediator, fasilitator, dan aktor pengembangan potensi ekonomi, seni budaya, dan kreativitas kaum muda sangat krusial untuk mengembalikan citra positif dan semangat pemuda dalam pembangunan bangsa.

Untuk memperkuat posisi KNPI, revitalisasi dan reorientasi peran organisasi diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, KNPI dapat kembali berfungsi sebagai pemersatu pemuda dan penggerak pembangunan yang efektif, menjawab kebutuhan pemuda dan bangsa, serta membuktikan eksistensi dan kontribusinya dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Simpulan

penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan antara KNPI dan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan kepemudaan telah berjalan dengan pola yang terstruktur dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip governance seperti kesetaraan dan akuntabilitas terimplementasi dengan baik dalam kemitraan ini. KNPI berperan aktif dalam perumusan kebijakan dan implementasi program-program yang mendukung pemuda, sementara pemerintah kota menyediakan dukungan hukum, finansial, dan infrastruktur yang diperlukan.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih mendalami evaluasi dampak dari program-program kepemudaan yang telah diimplementasikan. Analisis lebih lanjut terhadap manfaat konkret yang dirasakan oleh pemuda dan masyarakat, serta pengukuran efektivitas dari berbagai kegiatan yang dilakukan, dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang keberhasilan kemitraan ini dalam mencapai tujuan pembangunan kepemudaan. Selain itu, penting untuk menggali lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program. Ini akan membantu mengidentifikasi area-area perbaikan yang dapat memperkuat transparansi dan efisiensi dalam kemitraan kedepannya.

REFERENSI

- aslinda, Guntur, M., & Suhartini. (2022). The Implementation Of Multi-Organization Model On Program Keluarga Harapan In Makassar City. *Kasetsart Journal Of Social Sciences*, 43(1). <https://doi.org/10.34044/J.Kjss.2022.43.1.19>
- Bimantoro, B. (2021). Peran Komite Nasional Pemuda Indonesia (Knpi) Terhadap Rekonstruksi Demokrasi Di Palembang. *Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang*.
- Grossman, G., & Slough, T. (2022). Government Responsiveness In Developing Countries. In *Annual Review Of Political Science* (Vol. 25). <https://doi.org/10.1146/Annurev-Polisci-051120-112501>

- Hipolito-Delgado, C. P., Stickney, D., Kirshner, B., & Maul, A. (2021). Beyond The Trifold In Civics Presentations: The Measure Of Youth Policy Arguments. *Journal Of Youth Development*, 16(4). <https://doi.org/10.5195/Jyd.2021.1011>
- Maiboroda, A., Sablina, A., & Yasaveev, I. (2021). The State For Youth Or Youth For The State: Discourses Of Youth Policy In The Eu And Russia. *Russian Sociological Review*, 20(3). <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2021-3-71-97>
- Nursamsami, A., A. Syamsu, J., & Hasrul, M. (2020). Strategi Komunikasi Pengurus Knpi Sulawesi Selatan Untuk Mendorong Partisipasi Program Kemitraan Organisasi Kepemudaan. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 21(2). <https://doi.org/10.24252/Jdt.V21i2.13199>
- Praja, S. E., Munir, A. R., & Irwan, L. (2021). The Role Of Youth Force Muhammadiyah (Amm) In Developing The Suprastructure And Youth Infrastructure In Knpi South Sulawesi. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi*
- Purna, Z. A., & Didin, D. (2022). Birokrasi Dalam Ekosistem Politik. Masihkah Birokrasi Menjadi Artikulator Pilihan Publik? *Jurnal Arajang*, 5(1). <https://doi.org/10.31605/Arajang.V5i1.2731>
- Querol, V. A., Nicolau, E. G., & Sánchez, X. G. (2021). Youth Policy Adaptation In The Spanish Rural Context: A Case Of Study Of Youth Policy Programs. *Calitatea Vietii*, 32(4). <https://doi.org/10.46841/Rcv.2021.04.05>
- Sukmawati, A., & Rafni, A. (2020). Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda Di Kota Padang. *Journal Of Civic Education*, 3(2). <https://doi.org/10.24036/Jce.V3i2.349>
- Vallentin, S. (2022). Trust, Power And Public Sector Leadership. In *Trust, Power And Public Sector Leadership*. <https://doi.org/10.4324/9780429431104>
- Walther, A., Lüküslü, D. G., Loncle, P., & Pais, A. (2021). Regimes Of Youth Participation? Comparative Analysis Of Youth Policies And Participation Across European Cities. *Young*, 29(2). <https://doi.org/10.1177/1103308820937550>